

Studi Efektifitas dan Efisiensi Kenaikan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2016 terhadap Penghasilan Buruh

Harjo Lukito ^{a*}

^aProgram Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mayjen Sungkono

***Koresponden penulis: harjo.lukito88@gmail.com**

Abstract

This research is intended to know, whether the increase in the amount of Increase in Non-Taxable Income (PTKP) in 2016 by 50% is effective and efficient to the income of workers in furniture export companies in East Java? The selected research sample is primary data of income and marital status of laborers in furniture export company through PT. Kurnia Anggun that in Mojokerto regency, period of June 2016 - March 2017. The research method used sumatif evaluation method. From the results of this study shows the amount of increase of PTKP in 2016 effective for workers with efficiency: 1. the number of workers with income above the average PTKP of 68.84%; 2. increase in labor income above PTKP on average by 59.75%; 3. PPh-21 is payable on average of 74.20% with accumulated amount of Rp. 500.04 million for 10 months in which the amount is reimbursed to workers.

Keywords: PTKP 2016, labor income

Pendahuluan

Keputusan pemerintah untuk menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp. 36.000.000,- menjadi Rp. 54.000.000,- setahun, merupakan berita yang menggembirakan bagi wajib pajak (WP) pada umumnya dan para tenaga kerja langsung (buruh) pada khususnya. Keputusan yang telah diumumkan pada bulan Juni 2016 oleh Menteri Keuangan yang juga disetujui oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat namun pelaksanaannya dimulai bulan Januari 2016 (berlaku surut).

Bagi buruh, kenaikan PTKP sebesar 50% ditahun 2016 dibanding PTKP tahun 2015 dengan UMK tahun 2016, maka pajak yang dipotong untuk disetor ke negara akan berkurang dibanding sebelumnya, sehingga diharapkan penghasilan yang diterima oleh buruh akan lebih besar.

Bagi Wajib Pajak (khususnya buruh), kenaikan penghasilan yang disebabkan oleh kenaikan PTKP menurut Menkeu (<http://www.kemenkeu.go.id>), untuk melindungi dan/atau meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan berapa efisiensi : (1) jumlah buruh yang berpenghasilan diatas PTKP; (2) akumulasi penghasilan buruh di atas PTKP; (3) PPh-21 terutang dari buruh.

Tinjauan Teoritis dan Hipotesis

Wajib Pajak

Definisi dari wajib pajak (WP) adalah seseorang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan harus melakukan kewajiban perpajakan, atau lebih singkatnya orang atau badan yang memiliki kewajiban membayar pajak (Choerul Muzammil dan Astrid Budiarto, 2016, 5), maka buruh termasuk wajib pajak.

Buruh

Buruh atau pekerja adalah orang yang bekerja di bawah perintah orang lain, dengan menerima upah atau imbalan karena yang bersangkutan melakukan pekerjaan di perusahaan (Dr. Sumanto, M.A., 2013).

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah suatu sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP pada perhitungan pajak terutang di PPh-21 sebesar tarif pajak X 120% X Penghasilan Kena Pajak.

Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto merupakan jumlah penghasilan buruh secara keseluruhan pada bulan berjalan artinya tidak hanya gaji pokok saja yang masuk dalam perhitungan penghasilan bruto namun juga tunjangan-tunjangan lainnya bila ada, misalnya uang lembur, bonus, uang perjalanan dinas, uang makan, uang cuti, THR, tunjangan-tunjangan lainnya (Choerul Muzammil dan Astrid Budiarto, 2016, 37).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP adalah besaran nilai yang telah ditentukan oleh pemerintah yang telah dipergunakan sebagai pengurang penghasilan bruto pada waktu menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh-21). Dengan kata lain PTKP merupakan batasan penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan.

PTKP besarnya berbeda-beda tergantung status pernikahan wajib pajak, apakah sudah menikah atau belum dan jumlah anak dalam keluarga yang dibatasi maksimal 3 orang anak yang masih ditanggung oleh wajib pajak.

Tabel 1. Kenaikan PTKP tahun 2016 (PMK Nomor 101/PMK.010/2016)

Mulai Berlaku	1 Januari 2015	1 Januari 2016	% Kenaikan
Status WP	PTKP Setahun (Rp)	PTKP Setahun (Rp)	
TK/0	36.000.000	54.000.000	50%
TK/1	39.000.000	58.500.000	50%
TK/2	42.000.000	63.000.000	50%
TK/3	45.000.000	67.500.000	50%
K/0	39.000.000	58.500.000	50%
K/1	42.000.000	63.000.000	50%
K/2	45.000.000	67.500.000	50%
K/3	48.000.000	72.000.000	50%
K/I/0	75.000.000	112.500.000	50%
K/I/1	78.000.000	117.000.000	50%
K/I/2	81.000.000	121.500.000	50%
K/I/3	84.000.000	126.000.000	50%

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Apabila wajib pajak tersebut adalah tenaga kerja langsung/buruh maka besarnya PKP adalah penghasilan bruto dikurangi PTKP (sesuai dengan status perkawinan wajib pajak dan besaran PTKP yang berlaku pada waktu itu).

Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas serta pengamatan data penghasilan di perusahaan, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat diturunkan sebagai berikut:

1. Rata-rata terjadi efisiensi jumlah wajib pajak dengan penghasilan di atas PTKP tahun 2016 sebesar 50% dibanding menggunakan PTKP tahun 2015.
2. Rata-rata terjadi efisiensi akumulasi penghasilan di atas PTKP sebesar 50 % dibanding dengan menggunakan PTKP tahun 2015.
3. Rata-rata terjadi efisiensi jumlah PPh-21 terutang sebesar 50 % dibanding dengan menggunakan PTKP tahun 2015.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian evaluasi sumatif, dimana sasaran penelitian evaluasi sumatif menurut Prof. Dr. Sugiyono (2014) adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Evaluasi Sumatif digunakan untuk mengetahui hasil dari suatu program
2. Menekankan pada efektivitas pencapaian program yang berupa produk tertentu.
3. Untuk mengetahui ketercapaian visi, misi dan tujuan dari suatu proyek, kebijakan dan program.

4. Untuk pertimbangan dalam membuat keputusan.

Dengan demikian penelitian ini tidak menguji hipotesis melainkan untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien program peningkatan besaran PTKP tahun 2016 dibanding tahun 2015 terhadap penghasilan buruh.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghasilan buruh perusahaan mebel Jawa Timur. Sedangkan sampel yang diambil adalah buruh di perusahaan ekspor mebel yaitu PT Kurnia Anggun yang terletak di Kabupaten Mojokerto, dimana buruh tersebut menerima penghasilan disetiap bulan, sedang pengolahan data penghasilan buruh untuk diolah menjadi laporan PPh-21 baik dengan dasar PTKP tahun 2015 maupun PTKP tahun 2016 yang dimulai bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 (selama 10 bulan).

Efisiensi Jumlah Buruh Dengan Penghasilan Per Bulan Di Atas PTKP

Efisiensi jumlah buruh dengan penghasilan per bulan di atas PTKP bisa di hitung dengan menjumlahkan gaji pokok yang ditambahkan dengan tunjangan-tunjangan. Dari hasil penjumlahan tersebut dikurangi PTKP tahun 2015 hasilnya terdapat a1 orang buruh yang penghasilannya di atas PTKP tahun 2015, kemudian penghasilan yang sama dikurangi PTKP tahun 2016 terdapat a2 orang buruh yang penghasilannya di atas PTKP tahun 2016. Maka efisiensi jumlah buruh dengan penghasilan di atas PTKP bisa dirumuskan sebagai berikut : $((a1-a2)/a1) \times 100\% = a\%$

Efisiensi Akumulasi Penghasilan Buruh Di Atas PTKP

Efisiensi akumulasi penghasilan buruh diatas PTKP perhitungannya hampir sama dengan langkah menghitung efisiensi jumlah buruh dengan penghasilan di atas PTKP yaitu mengetahui jumlah penghasilan setiap buruh, kemudian dikurangi dengan PTKP tahun 2015 maka akan diketahui akumulasi penghasilan buruh sebesar Rp. b1, kemudian penghasilan tersebut dikurangi dengan PTKP tahun 2016 akan diketahui akumulasinya sebesar Rp. b2, maka efisiensi akumulasi penghasilan buruh di atas PTKP dirumuskan sebagai berikut : $((b1-b2)/b1) \times 100\% = b\%$

Efisiensi Jumlah PPh-21 Terutang Dari Buruh

Jumlah PPh-21 terutang dari buruh Pajak bisa dihitung dengan cara penghasilan buruh dalam satu bulan dikalikan 12 hasilnya dikurangi PTKP yang sesuai dengan status buruh akan menghasilkan Pendapatan Kena Pajak (PKP) dikalikan tarif pajak hasilnya adalah PPh-21 terutang yang berlaku bagi buruh yang mempunyai NPWP, sedang bagi buruh yang tidak mempunyai NPWP maka PPh-21 terutang dikalikan 120%.

Untuk menghitung efisiensi Jumlah PPh-21 terutang dari buruh bisa dibaca seperti berikut :

$((\text{Total penghasilan sebulan} \times 12) - \text{PTKP tahun 2015}) \times \text{tarif} : 12 = \text{Rp. c1,-}$

$((\text{Total penghasilan sebulan} \times 12) - \text{PTKP tahun 2016}) \times \text{tarif} : 12 = \text{Rp. c2,-}$

Maka efisiensi jumlah PPh-21 terutang dari buruh/Wajib Pajak adalah :

$$((\text{Rp. c1} - \text{Rp. c2}) / \text{Rp. c1}) \times 100\% = \text{c}\%$$

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil pengolahan data base diperoleh informasi yang bisa dibaca sesuai tabel-tabel berikut ini :

Jumlah Buruh Berpenghasilan Di Atas PTKP

Tabel 2. Efisiensi Jumlah Buruh Dengan Penghasilan Per Bulan Di Atas PTKP

Bulan	Jumlah Buruh (Orang)	Rata-2 Penghasilan Per Bulan (Rp Juta)	Jumlah Buruh Berpenghasilan Di Atas PTKP Tahun 2015 (Orang)	Jumlah Buruh Berpenghasilan Di Atas PTKP Tahun 2016 (Orang)	Efisiensi (%)
Jun-2016	1442	6,11	1396	1145	17,98
Jul-2016	1345	2,92	328	8	97,56
Ags-2016	1673	2,99	595	62	89,58
Sep-2016	1699	3,18	590	48	91,86
Okt-2016	1715	3,31	789	57	92,78
Nop-2016	1737	3,37	888	73	91,78
Des-2016	1723	3,52	927	208	77,56
Jan-2017	1767	4,14	1201	479	60,12
Peb-2017	1784	4,23	1320	461	65,08
Mar-2017	1786	4,04	1295	366	71,74
Jumlah	16671		9329	2907	
Rata-Rata	1667,1	3,77	932,9	290,7	68,84

Dari tabel 2, bisa dianalisis bahwa dengan kenaikan besaran PTKP tahun 2016 terhadap PTKP tahun 2015, penghasilan per bulan yang di atas PTKP pada buruh PT. Kurnia Anggun periode bulan Juni 2016 - Maret 2017 yang semula akumulasinya mencapai 9329 orang, dengan peningkatan besaran PTKP tahun 2016 terjadi penurunan jumlah nya menjadi 2907 buruh. Dengan demikian terjadi rata-rata efisiensi sebesar 68,84%.

Akumulasi Penghasilan Buruh Di Atas PTKP

Tabel 3. Efisiensi Akumulasi Penghasilan Buruh di Atas PTKP

Bulan	Akumulasi Penghasilan Per Bulan (Milyar)	Akumulasi Penghasilan Di Atas PTKP Tahun 2015 (Milyar)	Akumulasi Penghasilan Di Atas PTKP Tahun 2016 (Milyar)	Efisiensi (%)
Jun-2016	8,81	8,72	7,48	14,19
Jul-2016	3,92	1,20	0,04	96,81
Ags-2016	5,00	2,36	0,32	86,21
Sep-2016	5,41	2,29	0,24	89,67
Okt-2016	5,67	3,06	0,28	90,86
Nop-2016	5,85	3,46	0,36	89,56
Des-2016	6,07	3,94	1,06	73,17
Jan-2017	7,32	5,70	2,78	51,28
Peb-2017	7,55	6,19	2,68	56,70
Mar-2017	7,21	5,76	1,94	66,32
Jumlah	62,80	42,68	17,18	
Rata-Rata	6,28	4,268	1,718	59,75

Dari tabel 3, bisa dianalisis bahwa akumulasi penghasilan buruh di atas PTKP tahun 2015 pada PT. Kurnia Anggun periode Juni 2016 – Maret 2017 sebesar 42,68 milyar maka dengan peningkatan besaran PTKP tahun 2016 penghasilan diatas PTKP menjadi 17,18 milyar. Dengan demikian peningkatan besaran PTKP tahun 2016 terjadi rata-rata efisiensi sebesar 59,75% pada akumulasi penghasilan buruh.

Jumlah PPh-21 Terutang Buruh

Tabel 4. Efisiensi Jumlah PPh-21 Terutang Dari Buruh

Bulan	Rata-2 Penghasilan Buruh Per Bulan (Rp Juta)	Akumulasi PPh-21 Terutang Dengan PTKP Tahun 2015 (Rp. Juta)	Akumulasi PPh-21 Terutang Dengan PTKP Tahun 2016 (Rp. Juta)	Selisih Akumulasi PPh-21 Terutang (Rp. Juta)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
Jun-2016	6,11	226,24	97,60	128,64	56,86
Jul-2016	2,92	8,61	0,11	8,50	98,69
Ags-2016	2,99	22,67	1,62	21,05	92,87
Sep-2016	3,18	21,76	0,85	20,92	96,11
Okt-2016	3,31	28,50	0,96	27,54	96,64
Nop-2016	3,37	33,07	1,39	31,68	95,81
Des-2016	3,52	50,43	5,28	45,16	89,54
Jan-2017	4,14	97,76	26,99	70,78	72,39
Peb-2017	4,23	102,07	26,79	75,28	73,75
Mar-2017	4,04	82,79	12,29	70,50	85,16
Jumlah		673,90	173,86	500,04	
Rata-Rata	3,77	67,39	17,386	50,004	74,20

Dari tabel 4, bisa dianalisis bahwa akumulasi PPh-21 terutang dengan PTKP tahun 2015 dengan periode yang sama sebesar Rp. 673,90 juta, sedangkan dengan menggunakan PTKP tahun 2016 akumulasinya sebesar Rp. 173,86 juta, maka terjadi penurunan sebesar Rp. 500,04 juta atau terjadi rata-rata efisiensi pada PPh-21 terutang sebesar 74,20%.

Penurunan PPh-21 terutang sebesar Rp. 500,04 juta dalam periode tersebut berarti uang sebesar itu yang semestinya disetor ke negara, namun dengan peningkatan besaran PTKP tahun 2016, uang tersebut diterimakan kembali lagi ke buruh.

Penutup

Simpulan. Dari penelitian di atas bisa diambil kesimpulan bahwa kenaikan PTKP sebesar 50% pada tahun 2016 adalah efektif serta terjadi efisiensi di atas 50% terhadap 1. Jumlah buruh berpenghasilan di atas PTKP; 2. Akumulasi penghasilan buruh di atas PTKP; dan 3. PPh-21 terutang dari buruh.

Saran. Sebaiknya kenaikan besaran PTKP menjadi perhatian dari pemerintah di masa yang akan datang, karena kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) hampir terjadi setahun sekali, sehingga tidak terjadi UMK lebih besar dari PTKP untuk wajib pajak dengan status lajang tanpa tanggungan (TK/0).

Daftar Pustaka

1. Anastasia Diana & Lilis Setiawati, Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini, Penerbit Andi Yogyakarta, 2014
2. Choerul Muzammil & Astrid Budiarto, Pedoman Praktis Membayar Pajak, Genesis Learning Yogyakarta, 2016.
3. Mardiasmo, Prof., MBA., Ak., Perpajakan Edisi Terbaru, Andi Publisher Yogyakarta, 2016.
4. Sugiyono, Prof., Dr., Metode Penelitian Manajemen, Penerbit Alfabeta Bandung, 2014.
5. Sumanto, Dr., M.A., Hubungan Industrial, Penerbit CAPS Yogyakarta, 2014
6. T. Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia, BPFE Yogyakarta, 2000, cetakan keempat belas.
7. Winardi Sutantyo & Markus Robijanto Kusuma, Pemrograman dBase III Plus, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia Jakarta, Juni 1992.

Sumber Pendukung:

<http://www.kemenkeu.go.id>

PMK Nomor 101/PMK. /2016

